

**PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI
TENTANG ADD (ALOKASI DANA DESA) DI DESA MARIRI SATU KECAMATAN
POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Oleh :

GLORIANA TALITA CAESARIA LEGARANO

Yuriewaty Pasoreh

Meiske Rembang

Email : glorianamemey@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyampaikan Informasi Tentang ADD (Alokasi Dana Desa) Di Desa Mariri Satu Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.. Dari konsep tersebut sangat jelas terlihat bahwa pemerintah harus memberikan informasi dengan baik dan benar kepada masyarakat tentang berbagai program pemerintah tersebut. Aparatur pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah yakni Ketua Lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang komunikasi pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Teori Kredibilitas Sumber*. Informan dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling yaitu dengan menentukan objek sebagai unit analisis sesuai topik. Teknik penetapan purposive sampling digunakan pada penetapan informan pemerintah desa, kerana subjek penelitian sudah dapat diprediksi karena jelas sebagai petugas atau aparat pemerintah di desa untuk itu di ambil 4 informan, sedangkan Teknik purposive sampling digunakan pada penetapan infroman dari unsur masyarakat yang memang jumlahnya sangat banyak, oleh sebab itu diperlukan penentuan secara snowball sampling. Untuk informan masyarakat ditentukan 2 informan. Secara keseluruhan jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 informan.

. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengaktifkan kembali website desa untuk informasi lebih lanjut tentang ADD dan bisa memberikan undangan khusus melalui *media sosial* untuk pelaksanaan musyawara desa bagi Masyarakat Mariri Satu.

Kata Kunci : Peran Pemerintahan, Masyarakat.

THE ROLE OF GOVERNMENT COMMUNICATION IN DELIVERING INFORMATION ABOUT ADD (ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS) IN MARIRI VILLAGE ONE OF POIGAR DISTRICT, BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

By:

GLORIANA TALITA CAESARIA LEGARANO

Yuriewaty Pasoreh

Meiske Rembang

Email: glorianamemey@gmail.com

SUMMARY

This study aims to determine the Role of Government Communication in Delivering Information About ADD (Village Fund Allocation) in Mariri Satu Village, Poigar District, Bolaang Mongondow District. From this concept it is clear that the government must provide information properly and correctly to the public about various government programs. The government apparatus as a government communicator consisting of lower levels, namely the Chairperson of the Environment up to a high level, namely the President must be able to communicate everything that is to be communicated about government communication. The theory used in this research is the Source Credibility Theory. The informants in this study were conducted by purposive sampling by determining the object as a unit of analysis according to topic. The purposive sampling technique was used in the determination of village government informants, because the research subjects were predictable because it was clear that as an official or government official in the village, 4 informants were taken, while the purposive sampling technique was used in determining the information from the elements of the community which were very numerous. therefore snowball sampling is needed. For community informants, 2 informants were determined. In total the number of informants in this study were 6 informants.

. This shows that the government can reactivate the village website for more information about ADD and can provide special invitations through social media to conduct village meetings for the Mariri Satu Community.

Keywords: Role of Government, Society.

PENDAHULUAN

Pelayan prima dari pemerintah kepada masyarakat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah merupakan tugas wajib yang harus dilaksanakan secara optimal oleh seluruh jajaran pemerintah yang ada di pusat sampai pada level paling terendah yaitu pemerintah desa. Salah satu upaya pelayanan prima pemerintah tersebut dapat tercapai melalui adanya komunikasi pemerintah dengan masyarakat yang berjalan baik. Erliana Hasan (2005) : Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

. Sebagai tugas pokok pemerintahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pekerjaan umum, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah mejadi hal yang paling vital agar pemerintah mempunyai komunikator pemerintah yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi dalam upaya-upaya mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan. Berbicara mengenai komunikasi pemerintahan, akan dihadapkan pada teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan yang mampu memahami kesalahan yang telah terjadi, menepis salah tafsir atas apa yang telah disampaikan, salah pengertian serta ketidakjelasan komunikasi antara komunikator dengan komunikan.

Salah satu program pemerintah yang cukup viral saat ini adalah adalah program alokasi dana desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa. Tahun 2018 ini pemerintah mengalokasikan dana Rp. 60 Triliun, sama dengan 2017 lalu. Rencana mengucurkan Rp. 120 triliun ditunda tahun 2019 karena berbagai pertimbangan. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap desa mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan jumlah yang cukup fantastis sampai pada kisaran 1 miliar untuk setiap desa. Alokasi dana desa tersebut diberikan kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa dan diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan diberbagai bidang.

Melihat cukup fantastisnya jumlah alokasi dana desa tersebut, banyak juga menimbulkan permasalahan akibat dari penyalahgunaan dana desa tersebut, mulai dari penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa serta kurangnya informasi tentang dana desa tersebut. Masalah penyalahgunaan dana desa yang kebanyakan sudah ditangani oleh pihak berwajib, sudah sangat sering terjadi dan terlihat melalui media massa di Indonesia. Sementara untuk permasalahan masih kurangnya informasi tentang adanya alokasi dana desa tersebut oleh masyarakat, adalah merupakan salah satu hal perlu menjadi perhatian oleh pemerintah saat ini. Dari pengamatan awal peneliti pada saat melakukan tugas lapangan, ternyata masih banyak masyarakat di desa Mariri Satu yang tidak memahami dan tidak mengetahui tentang program alokasi dana desa tersebut.

Permasalahan disini, tentu yang perlu diteliti lebih mendalam bahwa masalah komunikasi dari pemerintah masih jadi masalah utama dan perlu ditingkatkan dalam memberikan informasi tentang alokasi dana desa tersebut kepada masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Menyampaikan Informasi Tentang Add (Anggaran Dana Desa) Di Desa Mariri Satu Kecamatan Poigar Bolaang Mogondow?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Menyampaikan Informasi Tentang Add (Anggaran Dana Desa) Di Desa Mariri Satu Kecamatan Poigar Bolaang Mogondow?

MANFAAT PENELITIAN

MANFAAT TEORITIS

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan bagi perkembangan keilmuan, terlebih khusus kajian ilmu komunikasi, dan komunikasi pemerintahan.

MANFAAT PRAKTIS

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa maupun masyarakat, dalam mengelola serta menginformasikan adanya anggaran dana desa, bagi masyarakat setempat

KONSEP KOMUNIKASI

PENGERTIAN KOMUNIKASI

Horold Lasswell menyatakan bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui jaringan apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya” (Cangara, 2002:18).

Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *communication* yang bersumber pada kata *communis* yang berarti sama, dalam arti kata sama makna. Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 2003:4).

Komunikasi merupakan unsure penting bagi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi makhluk sosial, setiap manusia akan melaksanakan kegiatan komunikasi bila ingin mengadakan hubungan dengan pihak lain. Oleh sebab itu, terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (Effendy, 2002:3).

Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pengoperan gagasan, pendapat atau pemikiran dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol yang dapat dipahami bersama.

TUJUAN KOMUNIKASI

Tujuan komunikasi pada umumnya adalah untuk mempengaruhi, membentuk pendapat atau merubah perilaku komunikan. Pendapat yang dikemukakan Widjaja, (1986 : 10 – 11) adalah sebagai berikut:

- a. Supaya pesan komunikasi atau informasi yang kita sampaikan dapat dimengerti.

- b. Memahami orang lain.
- c. Supaya gagasan kita dapat diterima orang lain.
- d. menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu.”

Kemudian tujuan komunikasi dikemukakan oleh Liliweri, (1991 : 8) adalah :

- a. Social Change (perubahan sosial)
- b. Attude Change (perubahan sikap)
- c. Opinion Change (perubahan pendapat)
- d. Behavior Change (perubahan tingkah laku)”

Dapatlah disimpulkan atau dirangkum bahwa tujuan komunikasi adalah memberikan pemahaman, dukungan gagasan dan berusaha untuk membentuk dan mempengaruhi komunikasi agar supaya bertindak sesuai dengan isi pesan komunikasi yang disampaikan komunikator. Tujuan komunikasi juga sering disimpulkan adalah untuk mencapai kesepahaman bersama antara komunikator dan komunikan.

UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI

Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek . unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi.

Sumber, Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *source*, *sender*, atau *encoder*.

Pesan, Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *content* atau *information* (Hafied Cangara, 2008;22-24).

Media, Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan biasanya digunakan media massa (Hafied Cangara, 2008;123-126).

Penerima, Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut *audience* atau *receiver*. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber.

Pengaruh atau efek, Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan (Hafied Cangara, 2008;22-27).

KONSEP PEMERINTAHAN

Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. (Surianingrat, 1992 : 9-10)

Umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.² Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikuitp dari <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-pemerintahan> Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi pemerintahan dari beberapa ahli, yaitu : Erliana Hasan (2005) : Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. María José Canel dan Karen Sanders dalam *Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research*(2011 : 85-86) *Government communication refers to the aims, role and practice of communication implemented by executive politicians and officials of public institutions in the*

service of a political rationale, and that are themselves constituted on the basis of the people's indirect or direct consent and are charged to enact their will.

PEMERINTAHAN DESA

Konsep Pemerintah Desa adalah Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011 : 3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permus-yawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda.

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. ADD atau alokasi dana desa adalah anggaran yang dikucurkan untuk desa dari pemerintah ditingkat kabupaten, Anggaran ini bersumber dari APBD kabupaten. Kemudian anggaran ini diturunkan ke desa secara bertahap yaitu sebanyak tiga tahap atau tiga kali dalam satu tahun. itu untuk didaerah saya maaf kalau untuk desa didaerah lain saya kurang tahu. Pencairan alokasi dana desa biasanya dengan pengajuan proposal yang di tanda tangani oleh kepala desa dan camat dari kecamatan.

Sumber : <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>

TEORI KREDIBILITAS SUMBER (*THE SOURCE OF CREDIBILITY*)

Teori kredibilitas sumber (The source credibility approach) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam

komunikasi persuasif, dengan asumsi dasarnya bahwa; " kredibilitas sumber atau komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi sangat berpengaruh pada sikap/perilaku orang lain" (infante, 1990:174).

Tan menambahkan bahwa "sumber yang kredibel lebih efektif dalam persuasi dari pada sumber yang tidak kredibel". Selaku pelaku utama dalam proses komunikasi, sumber memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. (Tan, 1981:112).

Proses komunikasi, komunikator (sumber) memiliki peranan penting menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan, kemampuan komunikator mempengaruhi komunikan berkaitan erat dengan karakter yang melekat pada komunikator itu sendiri. Asumsi tersebut didasarkan pada pendapat bahwa karakteristik komunikator yang mencakup keahlian dan kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan komunikator melaksanakan komunikasi (Tan, 1981:104).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Alokasi dana desa sangat penting bagi pembangunan masyarakat pedesaan, baik dari segala aspek, ekonomi, pertanian, perikanan, dan sebagainya, karena implementasi dari program add tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa, dengan memanfaatkan suntikan dana tersebut. Namun permasalahan yang timbul sering kali ada pada pengelolaan dana desa tersebut yang tidak tepat dan sering juga menyalahi aturan dan petunjuk teknisnya.

Maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran supaya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Saat ini, banyak program pembangunan desa yang mengalami kegagalan. Salah satunya adalah program pembangunan yang berusaha memberantas fenomena kemiskinan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat hidup dengan lebih mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin tidak terkendali setiap harinya. Cukup banyak faktor yang menyebabkan masyarakat di pedesaan hidup dengan terpuruk, dan terpaksa pula mereka harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan yang pada akhirnya berakibat kemiskinan berlangsung secara sistematis dan menimbulkan permasalahan yang beragam baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Dilatarbelakangi atas fenomena tersebut, muncul berbagai program setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk membangkitkan dan juga mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Ini merupakan wujud dari pemberdayaan dengan memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial seperti nilai kegotong royongan yang akhir-akhir ini sudah mulai terkikis.

ADD adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Perlu adanya ADD dikarenakan karena kebijakan ADD sejalan dengan

agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam komunitas sebuah pedesaan yang mana desentralisasi di tingkat desa tersebut akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berikut ini adalah hasil kesimpulan akhir dari penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Menyampaikan Informasi Tentang Add (Alokasi Dana Desa) Di Desa Mariri Satu Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mogondouw.

1. Secara keseluruhan peran komunikasi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang Alokasi Dana Desa belum terlalu optimal, karena belum banyak memanfaatkan berbagai pendekatan komunikasi dan media komunikasi yang dapat memperlancar informasi kepada masyarakat desa.
2. Kemampuan berkomunikasi aparat desa Mariri Satu, didukung dengan kemampuan Bahasa Indonesia serta Bahasa daerah setiap aparat desa, kemudian juga didukung dengan adanya kemampuan dalam memahami bagaimana proses pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut, melalui sosialisasi yang diikuti oleh aparat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, yang turun langsung memberikan sosialisasi di desa-desa yang berada di wilayah kabupaten
3. Proses dan bentuk komunikasi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang ADD kepada masyarakat, terjadi secara langsung melalui pertemuan warga, yang

dilaksanakan di balai desa, pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Aparat Pemerintah, BPD, Pemukiman Masyarakat, dan warga desa Mariri Satu.

4. Saluran atau media yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang ADD adalah melalui media baliho saja. Sementara untuk pemanfaatan website desa, media sosial pemerintah desa, serta media surat kabar, televisi dan radio masih belum optimal digunakan, sebagai saluran informasi kepada masyarakat termasuk informasi mengenai alokasi dana desa.
5. Hambatan utama pemerintah dalam melaksanakan program ADD tersebut adalah masih adanya perbedaan sudut pandang mengenai program ADD tersebut serta pemahaman masyarakat tentang ADD tersebut, sehingga terjadi penolakan dari beberapa masyarakat, kemudian juga masih ada masyarakat yang curiga dengan pelaporan keuangan ADD tersebut. Sehingga masih saja ada beberapa masyarakat yang memandang negative pada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

SARAN

Dari hasil kesimpulan penelitian dapat disarankan beberapa hal berkaitan dengan penelitian ini serta masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Mariri Satu, antara lain adalah :

1. Pemerintah masih perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan lebih banyak lagi belajar mengenai aturan, pelaksanaan ADD tersebut, termasuk juga perlu banyak mengikuti pelatihan, seminar ataupun sosialisasi dari pemerintah kabupaten/propinsi berkaitan dengan pengetahuan mengenai tata kelola ADD tersebut.

2. Pemerintah desa perlu mengembangkan serta menggunakan berbagai pendekatan dan bentuk komunikasi apa saja dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut.
3. Masyarakat juga perlu banyak belajar, menambah wawasan mengenai adanya program Alokasi Dana desa, serta perlu ikut serta mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program ADD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alexis.S .Tan. 1981. Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi.Jakarta - Jurnal Press.

Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.

Cangara, Hafied. 2002, *Pengantar Ilmu Komunikasi*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

....., 2008, *Pengantar Ilmu Komunikasi*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Effendy, Onong Uchjana. 2002. *"Ilmu, teori dan filsafat Komunikasi"* . Bandung: Citra Aditya Bakti.

....., 2003. *"Ilmu, teori dan filsafat Komunikasi"* . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Haryanto dkk, 1997, *Pemerintahan, Rineka Cipta*, Jakarta

Koentjaraningrat. 1991. Metode Penelitian Masyarakat. PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta

Kriyantono, Rahmat, 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Liliweri. (1998). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia* . Jakarta : penerbit Djambatan

Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

....., 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sartorti, Djam'an dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabera

....., 2011. Metode. Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustakabarupress

Surianingrat, Bayu. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta,

Teguh Meinanda, 1981, *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik*, Armico, Bandung.

Wahjudin, Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development*

Widjaja, W.A, 1996, Komunikasi dan hubungan masyarakat, Bina Aksara, Jakarta

Sumber Pustaka Lain :

Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan Nomor 6 Tahun 2014.